



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Salti Potabuga binti Sael Potabuga**, tempat dan tanggal lahir Langagon, 23 September 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang Sembako, alamat di Dusun I, Desa Bangomolunow, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 01 September 2020 dengan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya:

Nama : **Triani Potabuga binti Sael Potabuga**  
TTL : Langagon, 27 Februari 2002  
Umur : 18 Tahun, 6 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun I, Desa Bangomolunow, Kecamatan Bolaang,

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**

TTL : Solimandungan I, 08 Juli 1999

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun III, Desa Solimandungan I, Kecamatan Bolaang,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon Suaminya **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.30/Kua.23.01.03/PW.01/II/2020** tertanggal **17 Februari 2020**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 05 April 2016 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara adik Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga adik Pemohon sudah pernah hamil dan melahirkan anak yang kini sudah berusia 2 (dua) bulan;
5. Bahwa adik Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami adik Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon (**Triani Potabuga binti Sael Potabuga**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon yang bernama **Triani Potabuga binti Sael Potabuga**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini **Triani Potabuga** adalah gadis yang berusia 18 Tahun, 6 bulan;
- Bahwa sejak tanggal 05 April 2016 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki bernama **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Triani Potabuga** dengan **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa **Triani Potabuga** ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** sudah sangat erat dan **Triani Potabuga** telah hamil dan melahirkan anak yang saat ini berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa keluarga **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa **Triani Potabuga** dengan **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa **Triani Potabuga** beragama Islam;
- Bahwa saat ini **Triani Potabuga** telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga** berstatus jejak dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan **Triani Potabuga binti Sael Potabuga** sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah siap menikah dengan **Triani Potabuga binti Sael Potabuga**;
- Bahwa hubungannya dengan **Triani Potabuga binti Sael Potabuga** sangat dekat dan **Triani Potabuga binti Sael Potabuga** telah hamil dan melahirkan anak yang saat ini berusia 2 (dua) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan **Triani Potabuga binti Sael Potabuga** tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Triani Potabuga binti Sael Potabuga** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Triani Potabuga** sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Triani Potabuga** sangat dekat dan **Triani Potabuga** telah hamil dan melahirkan anak yang sekarang berumur 2 (dua) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan **Triani Potabuga** tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Triani Potabuga** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami **Triani Potabuga**) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon isteri nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salti Potabuga** (Pemohon), NIK: 7101136309940304 tertanggal 04 Juni 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Luri Pobela** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101131010120007 Tanggal 10 Februari 2020 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sael Potabuga** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101132603082282 Tanggal 22 Agustus 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Triani Potabuga** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-31072018-0017 Tanggal 31 Juli 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada calon Pengantin/wali dari KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B.30/Kua.23.01.03/PW.01/II/2020** tertanggal **17 Februari 2020**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.5;

B.-----

Saksi:

1. **Firja Potabuga binti Rajiun Potabuga** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Triani Potabuga** dengan seorang laki-laki bernama **Junaidi Kolopita**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2016, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Triani Potabuga** dengan **Junaidi Kolopita**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Junaidi Kolopita** telah bekerja sebagai Petani namun tidak tahu jumlah pasti penghasilan per-bulannya;

2. **Nuri Pobela bin Atili Pobela** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bangomolunow, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Triani Potabuga** dengan seorang laki-laki bernama **Junaidi Kolopita**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 4 (empat) tahun terakhir, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Triani Potabuga** dengan **Junaidi Kolopita**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Junaidi Kolopita** telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Triani Potabuga binti Sael Potabuga** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan percintaan sejak tahun

*Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan saat ini anak Pemohon pernah hamil dan melahirkan anak yang saat ini berusia 2 (dua) bulan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Firja Potabuga binti Rajiun Potabuga dan Nuri Pobela bin Atili Pobela;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Sael Potabuga** (Pemohon), menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan kedua anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Triani Potabuga** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **Triani Potabuga** lahir di Langagon pada tanggal 27 Februari 2002 adalah anak kandung kesatu dari **Sael Potabuga** (Pemohon) dan **Sunati Damopolii** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan identitas

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada Calon Pengantin/wali dari KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Junaidi Kolopita** dengan **Triani Potabuga** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka Pemohon selaku ayah kandungnya sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Firja Potabuga binti Rajiun Potabuga) dan saksi 2 (Nuri Pobela bin Atili Pobela) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2016, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
2. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon sudah pernah hamil dan melahirkan anak yang saat ini berusia 2 (dua) bulan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
3. Status anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;
4. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, harus lebih didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, selaras dengan kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengemukakan petunjuk dalam Al-Quran dalam surah an-Nur ayat 32 yang dipedomani dan dijadikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkahlah orang yang bujangan diantara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon (**Triani Potabuga binti Sael Potabuga**) untuk menikah dengan calon suami adik Pemohon (**Junaidi Kolopita bin Inang Potabuga binti Mondo Potabuga**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

ttd

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Llk  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

**Rp296.000,00**

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Lik  
07 September 2020 / 19 Muharam 1442

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)